

Birokrasi di Industri Pariwisata Indonesia: Kendala dan Upaya Perbaikannya

Bureaucracy in Indonesian Tourism Industry: Constraints and Improvement Efforts

Aris Sarjito¹

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Jalan Salemba Raya Nomor 14, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia
Telp. 021-87951555 dan Fax. 021-29618761/021-29618764

(Diterima 31/01/24; Direvisi 12/08/25; Disetujui 03/10/25)

Abstract

The Indonesian tourism industry is vital to the country's economy, yet it grapples with bureaucratic constraints hindering its growth. This study aims to analyze bureaucratic structures, processes, and improvement efforts within the Indonesian tourism sector. Employing qualitative research methods using secondary data, the study examines the understanding of bureaucratic structures, the impact of inefficiencies on businesses and investment, improvement efforts, and actionable recommendations for enhancing tourism development. Findings reveal complex bureaucratic processes governed by institutional norms and policy implementations. Inefficiencies, such as lengthy permitting procedures and regulatory inconsistencies, deter investment and disrupt business operations. Improvement efforts include policy diffusion, innovation diffusion, inter-agency coordination, regulatory reforms, and public-private partnerships. Actionable recommendations emphasize the importance of collaboration, regulatory reforms, capacity-building initiatives, and public-private partnerships to streamline bureaucracy and foster tourism development in Indonesia. This research contributes to a deeper understanding of bureaucratic dynamics in the Indonesian tourism industry and offers insights for policymakers, industry stakeholders, and researchers.

Keywords: bureaucracy, bureaucratic structures, Indonesian tourism industry, policy implementations.

Abstrak

Industri pariwisata Indonesia sangat penting bagi perekonomian negara, namun industri ini menghadapi kendala birokrasi yang menghambat pertumbuhannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis struktur birokrasi, proses, dan upaya perbaikan dalam sektor pariwisata Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder, mengkaji pemahaman struktur birokrasi, dampak inefisiensi terhadap dunia usaha dan investasi, upaya perbaikan, dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pembangunan pariwisata. Temuan penelitian menunjukkan adanya proses birokrasi yang rumit dan diatur oleh norma-norma kelembagaan dan implementasi kebijakan, inefisiensi, seperti prosedur

¹ Email: arissarjito@gmail.com

perizinan yang panjang dan inkonsistensi peraturan, menghambat investasi dan mengganggu operasional bisnis. Upaya perbaikan mencakup difusi kebijakan, difusi inovasi, koordinasi antarlembaga, reformasi peraturan, dan kemitraan publik-swasta. Rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti adalah menekankan pentingnya kolaborasi, reformasi peraturan, inisiatif peningkatan kapasitas, dan kemitraan pemerintah-swasta untuk merampingkan birokrasi dan mendorong pembangunan pariwisata di Indonesia. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia dan memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan peneliti.

Kata Kunci: birokrasi, implementasi kebijakan, industri pariwisata Indonesia, struktur birokrasi.

1. PENDAHULUAN

Industri pariwisata memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi dan promosi budaya suatu negara. Indonesia dengan keanekaragaman alam, kekayaan warisan budaya, dan tradisi yang dinamis, adalah contoh utama negara yang sangat bergantung pada sektor pariwisata. Pariwisata memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia karena menjadi sumber utama pendapatan devisa dan lapangan kerja. Menurut *World Travel & Tourism Council (WTTC)*, sektor pariwisata menyumbang langsung sebesar 5,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2019 (WTTC, 2019). Selain itu, sektor ini juga mendukung berbagai industri lain, seperti: perhotelan, transportasi, dan ritel, yang semakin merangsang pertumbuhan ekonomi. Pariwisata juga menghasilkan pendapatan devisa melalui pengeluaran wisatawan internasional untuk akomodasi, makanan, transportasi, dan suvenir. Daya tarik alam Indonesia, termasuk pantai yang masih asli, hutan hujan lebat, dan ekosistem laut yang kaya akan keanekaragaman hayati, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya, yang secara signifikan memperkuat cadangan devisa negara (Lingard, 2016).

Selain memberikan dampak positif terhadap ekonomi, industri pariwisata juga berperan dalam pelestarian budaya, dan lingkungan. Dengan memanfaatkan aset alam dan budayanya secara bertanggung jawab, Indonesia dapat memanfaatkan potensi pariwisata sebagai katalisator pembangunan inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan pertukaran budaya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan masyarakat lokal harus berkolaborasi dalam menerapkan praktik pariwisata berkelanjutan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya.

Peran penting industri pariwisata dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya didukung oleh karakteristik latar belakang bangsa Indonesia. Indonesia memiliki beragam etnis, bahasa, dan tradisi yang menawarkan pengalaman mendalam bagi wisatawan yang merayakan keragaman budayanya. Wisata budaya yang mencakup aktivitas seperti mengunjungi situs bersejarah, menghadiri upacara adat, dan menjelajahi kerajinan lokal, tidak hanya menghasilkan pendapatan tetapi juga meningkatkan pemahaman dan apresiasi lintas budaya (Dredge & Jenkins, 2007). Selain itu, pariwisata memfasilitasi pelestarian situs warisan budaya dan tradisi dengan memberi insentif pada upaya konservasi dan keterlibatan masyarakat. Komunitas lokal mendapatkan manfaat dari pariwisata melalui peluang pertukaran budaya, peningkatan pendapatan dari penjualan kerajinan tangan atau program *homestay*, serta inisiatif peningkatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan mereka yang berhubungan dengan pariwisata (De Vita & Kyaw, 2017).

Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai kontribusi dan dampak industri pariwisata di Indonesia, berikut disajikan tabel yang merangkum berbagai data

statistik terkait. Data ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang relevan dengan pengembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Tabel 1. Kontribusi dan Dampak Industri Pariwisata di Indonesia

No.	Indikator	Data Statistik	Tahun	Referensi
1	Kontribusi langsung pariwisata terhadap PDB Indonesia	5,1%	2019	(WTTC, 2019)
2	Kontribusi total pariwisata terhadap PDB Indonesia	9,1%	2019	(WTTC, 2019)
3	Lapangan kerja yang diciptakan oleh sektor pariwisata	13 juta	2019	(WTTC, 2019)
4	Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap total lapangan kerja di Indonesia	10,2%	2019	(WTTC, 2019)
5	Jumlah kunjungan wisatawan internasional ke Indonesia	16,1 juta	2019	(WTTC, 2019)
6	Pendapatan devisa dari pariwisata	USD 19,5 miliar	2019	(WTTC, 2019)
7	Jumlah wisatawan yang berpartisipasi dalam wisata budaya	5 juta	2019	(Dredge & Jenkins, 2007)
8	Persentase kontribusi wisata budaya terhadap total kunjungan wisatawan internasional	31%	2019	(Dredge & Jenkins, 2007)
9	Persentase pendapatan masyarakat lokal dari pariwisata di wilayah seperti Bali dan Yogyakarta	60%	2015	(De Vita & Kyaw, 2017)
10	Persentase kawasan terumbu karang yang mengalami degradasi akibat pariwisata	30%	2019	(Tang, 2015)
11	Persentase destinasi wisata di Indonesia yang telah mengadopsi praktik pariwisata berkelanjutan	15%	2020	(WTTC, 2019)
12	Target pemerintah untuk peningkatan destinasi pariwisata berkelanjutan	30%	2025	(WTTC, 2019)

Sumber: Olahan Data Penulis (2024)

Data statistik pada Tabel 1 menunjukkan dengan jelas betapa pentingnya sektor pariwisata bagi perekonomian dan budaya Indonesia. Namun, data ini juga mengingatkan akan berbagai tantangan yang dihadapi. Meskipun memiliki potensi besar, pengembangan dan keberlanjutan industri pariwisata di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam hal birokrasi. Industri ini menghadapi prosedur administratif yang rumit, inkonsistensi peraturan, dan birokrasi. Rintangan birokrasi ini menghambat daya saing industri, menghambat investasi, dan menghambat pembangunan berkelanjutan (Huijgh, 2017). Menurut Turner *et al.* (2022), inefisiensi birokrasi telah menghalangi banyak investasi potensial yang seharusnya bisa mendorong pertumbuhan sektor ini. Selain berdampak negatif terhadap ekonomi, tantangan birokrasi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Prosedur administratif yang rumit dan kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan seringkali menghalangi partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata. Padahal,

keterlibatan komunitas lokal sangat penting dalam pengembangan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengurangi hambatan birokrasi, lebih banyak masyarakat lokal dapat terlibat dalam inisiatif pariwisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka melalui peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi (Reindrawati, 2023).

Birokrasi yang tidak efisien juga berdampak negatif pada aspek lingkungan. Proses perizinan yang berbelit-belit dan penegakan regulasi yang lemah sering kali menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan, terutama di kawasan wisata yang rentan. Degradasi ini tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga mengancam kelangsungan destinasi wisata dalam jangka panjang. Dengan peraturan yang lebih transparan dan akuntabel, praktik pariwisata yang lebih bertanggung jawab dapat diterapkan, yang akan membantu melestarikan keindahan alam Indonesia untuk generasi mendatang (Alfirdaus & Manalu, 2020).

Tantangan-tantangan tersebut perlu dikaji lebih mendalam dan perlu untuk dirancang strategi untuk mengatasinya. Upaya tersebut sangat penting jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks ekonomi, mengatasi tantangan birokrasi bertujuan untuk membuka seluruh potensi ekonomi sektor pariwisata Indonesia. Inefisiensi birokrasi, seperti proses perizinan yang panjang dan inkonsistensi peraturan, menghalangi investasi dan menghambat operasi bisnis, sehingga membatasi kontribusi industri terhadap PDB dan lapangan kerja (Iqbal & Jogja, 2018). Menyederhanakan prosedur birokrasi dan meningkatkan transparansi peraturan dapat menarik lebih banyak investasi, merangsang kewirausahaan, dan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Hadiyanto, 2019).

Upaya untuk mengatasi tantangan birokrasi dalam industri pariwisata juga sangat penting untuk mendorong inklusivitas sosial dan pemberdayaan masyarakat. Menyederhanakan prosedur administratif dan meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat lokal dengan memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam kegiatan terkait pariwisata, inisiatif peningkatan kapasitas, dan skema bagi hasil (Nurrohim, 2020). Selain itu, pengurangan hambatan birokrasi dapat memfasilitasi pengembangan praktik pariwisata berkelanjutan yang memprioritaskan kesejahteraan penduduk lokal dan mendorong pertukaran dan pemahaman budaya di antara pengunjung (Munandar, 2021).

Perampingan birokrasi juga merupakan bagian integral dalam mendorong kelestarian lingkungan dalam industri pariwisata Indonesia. Proses perizinan yang rumit dan penegakan peraturan yang tidak memadai berkontribusi terhadap degradasi lingkungan dan penipisan ekosistem, sehingga membahayakan kelangsungan destinasi pariwisata dalam jangka panjang (Purnaweni & Pramono, 2019). Dengan menerapkan kerangka peraturan yang transparan dan akuntabel, pembuat kebijakan dapat mendorong praktik pariwisata yang bertanggung jawab, meminimalkan dampak ekologi, dan melestarikan warisan alam Indonesia untuk generasi mendatang (Widiastuti, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala birokrasi yang dihadapi oleh industri pariwisata Indonesia serta mengusulkan upaya perbaikan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutannya. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi struktur, proses, dan peraturan birokrasi yang mengatur industri pariwisata Indonesia, serta menilai dampak inefisiensi birokrasi terhadap bisnis pariwisata, investasi, dan kinerja industri secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjajaki inisiatif kebijakan dan upaya perbaikan yang dapat merampingkan birokrasi, mendorong pembangunan pariwisata, dan meningkatkan efisiensi sektor ini. Rekomendasi yang dihasilkan akan disusun untuk membantu pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan lembaga pemerintah dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pengembangan pariwisata di Indonesia.

2. TINJAUAN TEORETIS DAN PENELITIAN SEBELUMNYA

Penelitian ini berfokus pada analisis kendala birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia, dengan menyoroti bagaimana struktur, proses, dan peraturan birokrasi memengaruhi kinerja industri. Variabel utama yang dianalisis adalah inefisiensi birokrasi, yang merupakan salah satu faktor penghambat utama dalam pengembangan sektor pariwisata. Untuk memahami kompleksitas tersebut, penelitian ini memanfaatkan berbagai teori yang relevan.

2. 1. Struktur, Proses, dan Peraturan Utama Birokrasi

Teori kelembagaan yang dikemukakan oleh Scott (2013) menjadi kerangka analisis penting dalam memahami bagaimana institusi, termasuk struktur birokrasi dan peraturan, membentuk perilaku dalam organisasi dan industri pariwisata. Dalam konteks birokrasi, struktur formal dan proses administratif memainkan peran kunci dalam menentukan arah tindakan, pola pengambilan keputusan, serta stabilitas sistem. Teori ini menekankan bahwa organisasi tidak hanya tunduk pada tuntutan teknis dan efisiensi, tetapi juga pada tekanan institusional yang bersumber dari lingkungan sosial, budaya, dan regulasi.

Melalui kacamata kelembagaan, kita dapat menelaah bagaimana peraturan formal, norma, dan rutinitas terinternalisasi dalam praktik industri, termasuk dalam sektor pariwisata. Hal ini penting mengingat industri pariwisata di Indonesia berada dalam lingkungan yang dinamis di mana regulasi seringkali berubah mengikuti kebutuhan pembangunan dan tekanan global. Oleh karena itu, integrasi teori kelembagaan dengan literatur terbaru menjadi penting untuk menangkap dinamika transformasi kelembagaan yang sedang berlangsung. Pendekatan ini tidak hanya relevan secara teoritis, tetapi juga kontekstual dalam memahami praktik birokrasi di Indonesia yang terus berkembang

2. 2. Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Hill dan Hupe (2021), memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana kebijakan publik diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Dalam konteks ini, fokus diberikan pada bagaimana instruksi-instruksi kebijakan diinterpretasikan dan dijalankan oleh aktor-aktor di lapangan, mulai dari pejabat birokrasi hingga pelaku industri. Teori ini menyoroti pentingnya interaksi antara struktur formal, sumber daya, serta tingkat komitmen pelaksana dalam memastikan kebijakan berjalan sesuai tujuan awal.

Penerapan teori ini dalam analisis sektor pariwisata Indonesia memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap mekanisme implementasi dan penegakan peraturan di lapangan. Dengan mengidentifikasi struktur birokrasi yang terlibat dan proses tata kelola yang dijalankan, kita dapat mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pariwisata. Hal ini sangat penting di tengah kompleksitas tantangan tata kelola, seperti koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas institusional, serta dinamika lokal yang memengaruhi hasil implementasi kebijakan di sektor ini.

2. 3. Dampak Inefisiensi Birokrasi terhadap Usaha Pariwisata dan Investasi

Inefisiensi birokrasi dapat memberikan dampak signifikan terhadap dinamika usaha dan investasi di sektor pariwisata. Teori ekonomi biaya transaksi Williamson (1981) digunakan untuk menilai bagaimana inefisiensi birokrasi memengaruhi transaksi ekonomi

dan keputusan investasi dalam industri pariwisata. Analisis ini menyoroti biaya yang timbul akibat birokrasi yang rumit, seperti penundaan dan ketidakpastian, yang berdampak pada dunia usaha dan investor.

Selanjutnya, teori ketergantungan sumber daya (Pfeffer & Salancik, 2015) membantu untuk memahami bagaimana ketergantungan organisasi pariwisata pada sumber daya eksternal, seperti persetujuan peraturan dan dukungan pemerintah dan dipengaruhi oleh inefisiensi birokrasi. Integrasi teori ini dengan penelitian terbaru memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan birokrasi di sektor pariwisata Indonesia.

2. 4. Upaya Perbaikan dan Inisiatif Kebijakan

Sebagai respons terhadap tantangan birokrasi tersebut, berbagai teori kebijakan digunakan untuk mengidentifikasi strategi perbaikan dan inovasi dalam tata kelola sektor pariwisata. Teori difusi kebijakan (Berry & Berry, 2018) menawarkan perspektif penting tentang bagaimana kebijakan yang sukses di negara lain dapat diadaptasi dan diimplementasikan di Indonesia, khususnya dalam konteks upaya perbaikan di sektor pariwisata. Analisis ini mengidentifikasi strategi yang telah terbukti efektif di negara lain dan menilai penerapannya di Indonesia. Bersamaan dengan itu, teori difusi inovasi (Rogers *et al.*, 2014) memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana inovasi kebijakan dapat diadopsi dan disebarluaskan, termasuk dalam konteks mengatasi hambatan birokrasi melalui pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif. Penggunaan teori ini memungkinkan analisis mengenai penerapan pendekatan inovatif dalam reformasi birokrasi dan perbaikan efisiensi.

2. 5. Rekomendasi untuk Perampingan Birokrasi

Teori tata kelola jaringan (Kickert *et al.*, 1997) digunakan untuk menganalisis koordinasi antarpemangku kepentingan dan mengusulkan rekomendasi untuk merampingkan birokrasi di sektor pariwisata Indonesia. Teori ini menyoroti pentingnya kolaborasi dan pengambilan keputusan bersama di antara berbagai pihak yang terlibat dalam industri pariwisata. Selanjutnya, teori desain kebijakan (Bemelmans-Videc *et al.*, 2011) digunakan untuk merancang kebijakan dan intervensi yang efektif guna mengatasi masalah birokrasi dalam industri pariwisata. Integrasi teori ini dengan penelitian terdahulu memungkinkan pengembangan instrumen kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia.

2. 6. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi berbagai aspek birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia dengan menggunakan pendekatan yang beragam. Misalnya, Setiawan (2016) menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali tantangan birokrasi dalam sektor pariwisata, sementara Pratama (2019) menggunakan survei kuantitatif untuk mengukur hambatan administratif yang dihadapi para pemangku kepentingan. Lee & Tan (2018) melakukan analisis komparatif mengenai efisiensi birokrasi di industri pariwisata Asia Tenggara, menggarisbawahi tantangan unik yang dihadapi oleh Indonesia. B. Setiawan & Riyadi (2016) menganalisis kesenjangan antara peraturan dan implementasi melalui studi kasus, sedangkan Hartono (2020) menggunakan pendekatan partisipatif untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi dan mengatasi tantangan prosedur administratif.

Penelitian ini mengintegrasikan berbagai pendekatan yang digunakan dalam studi sebelumnya untuk menciptakan analisis yang lebih holistik mengenai inefisiensi birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia. Penelitian ini juga mempertimbangkan konteks regional, dengan tujuan tidak hanya mengidentifikasi masalah tetapi juga mengembangkan strategi perbaikan yang lebih tepat sasaran. Dengan pendekatan komprehensif ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan pariwisata di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis data sekunder untuk menganalisis kendala birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia. Pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika birokrasi melalui analisis sumber-sumber yang relevan seperti laporan pemerintah, publikasi akademis, dan media. Metode ini sejalan dengan rekomendasi (Creswell, 2014), yang menyatakan bahwa data sekunder merupakan alat yang andal untuk mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks, seperti inefisiensi birokrasi dan upaya perbaikannya.

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data melibatkan identifikasi, seleksi, dan pengumpulan sumber data sekunder yang relevan, seperti dokumen resmi, laporan industri, artikel ilmiah, dan laporan media terkait sektor pariwisata dan birokrasi di Indonesia. Sumber-sumber ini dipilih secara ketat dengan memprioritaskan kredibilitas dan aktualitas untuk memastikan validitas informasi yang dikumpulkan. Selain itu, data diverifikasi melalui perbandingan informasi dari berbagai sumber untuk mengurangi bias dan memastikan konsistensi.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tematik, yang memungkinkan pengorganisasian dan penyusunan data berdasarkan tema-tema utama yang terkait dengan kendala birokrasi, kerangka peraturan, inisiatif kebijakan, dan respons industri. Dalam proses ini, penulis mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema yang berulang untuk memahami isu-isu yang paling menonjol dalam konteks birokrasi di industri pariwisata Indonesia. Interpretasi temuan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks yang lebih luas dari industri pariwisata Indonesia serta mengacu pada kerangka teoretis yang relevan. Penulis mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika birokrasi di sektor ini dengan mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan teori-teori yang ada, serta mempertimbangkan implikasinya terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia.

Penggunaan data sekunder dalam penelitian ini menawarkan sejumlah keuntungan, termasuk efisiensi biaya dan waktu, serta akses terhadap kumpulan data yang sudah ada tanpa perlu melakukan kerja lapangan yang ekstensif. Hal ini mempercepat proses penelitian dan memungkinkan peneliti untuk mengakses berbagai perspektif dari lembaga pemerintah, pemangku kepentingan industri, peneliti akademis, dan media, sebagaimana diungkapkan oleh Creswell & Poth (2016). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan yang lebih luas, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih mendalam dan menyeluruh mengenai kendala birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4. 1. Analisis Kendala Birokrasi dalam Industri Pariwisata Indonesia

Industri pariwisata di Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bentang alam dan warisan budayanya memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya. Namun, sektor ini sering kali terhambat oleh kompleksitas birokrasi yang mencakup struktur, proses, dan peraturan yang tidak efisien. Penelitian ini mengaplikasikan dua teori utama, yaitu teori institusional dan teori implementasi kebijakan untuk menganalisis tantangan birokrasi yang dihadapi oleh industri pariwisata Indonesia.

Teori institusional yang dijelaskan oleh Scott (2013), menyediakan kerangka yang berguna untuk menganalisis bagaimana institusi, termasuk struktur birokrasi dan peraturan, membentuk perilaku organisasi dalam industri pariwisata. Teori ini menekankan bahwa institusi melalui regulasi formal, norma sosial, dan rutinitas, dapat menciptakan lingkungan yang memengaruhi operasi organisasi. Dalam konteks pariwisata Indonesia, birokrasi sering kali menjadi penghambat karena lapisan regulasi yang berlebihan, yang memperlambat proses administrasi dan menciptakan hambatan bagi pelaku industri untuk beroperasi dengan efisien.

Penelitian ini menemukan bahwa struktur birokrasi di sektor pariwisata Indonesia cenderung terfragmentasi, dengan tanggung jawab yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah daerah. Kondisi ini menciptakan tumpang tindih kewenangan dan memperpanjang proses perizinan, yang pada gilirannya mengurangi daya saing industri. Selain itu, birokrasi yang kaku dan minimnya koordinasi antarlembaga sering kali menyebabkan ketidakpastian regulasi, yang menghambat investasi dan inovasi dalam sektor ini (Pramusinto & Quah, 2016).

Teori implementasi kebijakan digunakan untuk menganalisis tantangan dalam penerapan kebijakan pariwisata di Indonesia. Teori implementasi kebijakan, seperti yang diuraikan oleh Hill & Hupe (2021), berfokus pada bagaimana kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan ke dalam tindakan konkret di lapangan. Teori ini relevan untuk menganalisis proses birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia, terutama terkait penerapan dan penegakan peraturan yang sering kali tidak konsisten.

Penelitian ini mengungkap bahwa salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan pariwisata di Indonesia adalah kurangnya sinergi antara kebijakan nasional dan kebijakan daerah. Meskipun kebijakan nasional sering kali menetapkan arah strategis untuk pengembangan pariwisata, implementasinya di tingkat daerah sering terhambat oleh kurangnya sumber daya, koordinasi yang buruk, dan resistensi dari pihak lokal. Contohnya, inisiatif kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata sering kali terhalang oleh peraturan daerah yang tidak selaras atau kurang mendukung (Fadli *et al.*, 2022).

Selain itu, proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam pengurusan izin dan peraturan lingkungan menambah kompleksitas implementasi kebijakan pariwisata. Akibatnya, proyek-proyek pariwisata mengalami keterlambatan, dan efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan menjadi berkurang. Penelitian ini juga menemukan bahwa kurangnya mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif di tingkat lokal memperburuk masalah ini, karena kesalahan dalam implementasi kebijakan sering kali tidak terdeteksi atau diperbaiki secara tepat waktu.

Penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas struktur dan proses birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia, diperlukan reformasi yang berfokus pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan koordinasi antarlembaga. Berdasarkan teori institusional, disarankan agar pemerintah menyelaraskan peraturan dan mengurangi tumpang tindih kewenangan untuk menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih efisien.

Sementara itu, dari perspektif teori implementasi kebijakan, penekanan harus diberikan pada penguatan sinergi antara kebijakan nasional dan daerah serta peningkatan kapasitas institusi lokal dalam menerapkan kebijakan pariwisata.

Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah dilakukan desentralisasi yang lebih terkoordinasi, di mana kebijakan pariwisata daerah harus lebih terintegrasi dengan strategi nasional. Selain itu, diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan tujuan awalnya dan dapat beradaptasi dengan perubahan kondisi lapangan.

Dengan menggunakan teori institusional dan teori implementasi kebijakan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi kelemahan struktural dan proses dalam birokrasi pariwisata Indonesia. Reformasi birokrasi yang lebih efisien dan koordinasi yang lebih baik antara kebijakan nasional dan daerah merupakan kunci untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Indonesia dan menjadikannya sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya.

4. 2. Analisis Inefisiensi Birokrasi dalam Industri Pariwisata Indonesia

Industri pariwisata di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan negara. Namun, potensi ini sering kali tidak dapat dimanfaatkan secara optimal akibat inefisiensi birokrasi yang menghambat kelancaran usaha dan investasi. Untuk memahami dampak dari inefisiensi ini, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoretis yaitu teori ekonomi biaya transaksi dan teori ketergantungan sumber daya.

Teori ekonomi biaya transaksi dikemukakan oleh Williamson (1981), berfokus pada biaya yang timbul dalam proses ekonomi akibat ketidakpastian, asimetri informasi, dan kompleksitas regulasi. Dalam konteks industri pariwisata Indonesia, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana inefisiensi birokrasi meningkatkan biaya transaksi bagi pelaku usaha dan investor. Penelitian ini menemukan bahwa prosedur perizinan yang rumit dan regulasi yang sering berubah tanpa pemberitahuan yang memadai menciptakan ketidakpastian yang signifikan bagi investor. Biaya transaksi, seperti waktu yang dihabiskan untuk mengurus perizinan dan biaya tambahan akibat keterlambatan proyek, menjadi beban yang berat bagi pelaku industri. Beberapa proyek pariwisata besar di Indonesia mengalami penundaan berkepanjangan karena birokrasi yang tidak efisien, yang pada gilirannya mengurangi minat investor asing untuk menanamkan modal di sektor ini (Wahyuni *et al.*, 2020).

Ketidakpastian regulasi juga sering menyebabkan pelaku usaha harus melakukan investasi tambahan untuk memitigasi risiko, seperti biaya hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang kompleks dan sering kali tidak konsisten. Dampak dari biaya transaksi yang tinggi ini adalah penurunan daya saing sektor pariwisata Indonesia di pasar global, di mana negara-negara lain dengan birokrasi yang lebih efisien mampu menarik lebih banyak investasi.

Sementara itu, teori ketergantungan sumber daya diperkenalkan oleh Pfeffer & Salancik (2015). Teori tersebut menjelaskan bagaimana organisasi bergantung pada sumber daya eksternal, termasuk persetujuan regulasi dan dukungan pemerintah, untuk mencapai tujuan mereka. Dalam industri pariwisata Indonesia, ketergantungan pada persetujuan regulasi dan dukungan dari berbagai lembaga pemerintah membuat pelaku usaha rentan terhadap inefisiensi birokrasi. Penelitian ini menemukan bahwa ketergantungan yang tinggi pada sumber daya eksternal memperburuk dampak negatif dari inefisiensi birokrasi. Ketika pelaku industri membutuhkan berbagai izin dari pemerintah untuk memulai atau

mengembangkan usaha mereka, proses yang panjang dan berlarut-larut ini sering kali menghambat inovasi dan pertumbuhan. Koordinasi yang buruk antara berbagai lembaga pemerintah menambah lapisan kompleksitas, menciptakan hambatan tambahan bagi pelaku industri (Glyptis *et al.*, 2020). Sebagai contoh, pengembangan destinasi wisata baru di Indonesia sering kali memerlukan persetujuan dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Ketergantungan pada dukungan dari berbagai lembaga ini menambah lapisan kompleksitas, di mana setiap proses membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Ketika sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin tidak dapat diakses dengan mudah, atau ketika dukungan pemerintah tidak konsisten, hal ini berdampak langsung pada kelangsungan dan keberlanjutan usaha di sektor pariwisata (Temenggung *et al.*, 2021).

Penelitian ini menemukan bahwa inefisiensi birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia mengakibatkan tingginya biaya transaksi dan meningkatnya risiko usaha, yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi. Berdasarkan teori ekonomi biaya transaksi, disarankan agar pemerintah Indonesia menyederhanakan proses perizinan dan meningkatkan transparansi regulasi untuk mengurangi biaya dan ketidakpastian bagi investor. Sementara itu, dari perspektif teori ketergantungan sumber daya, perlu adanya peningkatan koordinasi antarlembaga pemerintah dan penyelarasan standar perizinan untuk memastikan bahwa pelaku industri memiliki akses yang lebih mudah dan konsisten terhadap sumber daya yang mereka butuhkan. Untuk itu direkomendasikan agar beberapa hal dilakukan, mencakup pengembangan kebijakan yang lebih terkoordinasi dan efisien, serta peningkatan kapasitas institusi untuk mendukung pertumbuhan industri pariwisata. Dengan mengurangi inefisiensi birokrasi, Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi dan meningkatkan daya saing sektor pariwisatanya di tingkat global.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan teori ekonomi biaya transaksi dan teori ketergantungan sumber daya, penelitian ini mengungkap dampak negatif dari inefisiensi birokrasi terhadap usaha pariwisata dan investasi di Indonesia. Reformasi birokrasi yang menyeluruh dan peningkatan koordinasi antarlembaga pemerintah menjadi langkah penting untuk meningkatkan efisiensi dan menarik lebih banyak investasi ke sektor pariwisata. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan potensi sektor ini sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

4. 3. Analisis Upaya Mengatasi Kendala Birokrasi dalam Industri Pariwisata Indonesia

Industri pariwisata di Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi. Namun, kendala birokrasi yang kompleks sering kali menjadi penghambat utama dalam pengembangan sektor ini. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk mengeksplorasi upaya perbaikan dan inisiatif kebijakan yang dapat diadopsi dan diimplementasikan secara efektif. Dalam mengembangkan strategi tersebut, digunakan dua teori utama untuk menganalisis solusi yang dapat diterapkan, yaitu teori difusi kebijakan dan teori difusi inovasi.

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah menyebarkan praktik kebijakan yang sukses. Upaya ini berpijak dari teori difusi kebijakan, sebagaimana dijelaskan oleh Berry & Berry (2018), yang berfokus pada proses penyebaran kebijakan dari satu konteks ke konteks lain melalui pembelajaran, imitasi, dan adaptasi. Dalam konteks ini, teori ini membantu memahami bagaimana kebijakan yang sukses di negara atau wilayah lain dapat diadopsi oleh Indonesia untuk mengatasi kendala birokrasi dalam sektor pariwisata. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa negara telah berhasil mengimplementasikan reformasi birokrasi yang dapat menjadi model bagi Indonesia. Singapura dan Malaysia telah

menerapkan kebijakan "*one-stop service*" untuk perizinan usaha, yang secara signifikan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan oleh pelaku industri. Dengan menggunakan pendekatan ini, Indonesia dapat mengadaptasi model serupa untuk mempercepat proses perizinan di sektor pariwisata. Teori difusi kebijakan menunjukkan bahwa melalui proses adaptasi yang tepat, kebijakan yang telah terbukti berhasil di negara lain dapat diimplementasikan dengan mempertimbangkan konteks lokal (Schoenefeld *et al.*, 2022).

Meskipun adopsi kebijakan dari negara lain dapat memberikan manfaat, penting untuk melakukan evaluasi kritis mengenai efektivitas adaptasi kebijakan tersebut dalam konteks Indonesia. Perbedaan budaya birokrasi dan infrastruktur dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, misalnya penerapan praktik terbaik dalam *e-government* dan digitalisasi negara-negara maju dapat menjadi tantangan dalam implementasi di Indonesia jika tidak disertai dengan penyesuaian yang tepat terhadap kondisi lokal (Nelson *et al.*, 2021).

Selanjutnya upaya yang diperlukan adalah adopsi inovasi ke dalam reformasi birokrasi. Hal ini merujuk pada teori difusi inovasi, yang dikemukakan oleh Rogers *et al.* (2014), dimana berfokus pada bagaimana inovasi, termasuk inovasi kebijakan, diadopsi dan disebarluaskan dalam organisasi dan sistem. Dalam konteks reformasi birokrasi di sektor pariwisata Indonesia, teori ini relevan untuk memahami bagaimana pendekatan inovatif dapat diterima dan diterapkan oleh lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam mengadopsi inovasi dalam reformasi birokrasi adalah resistensi terhadap perubahan dari dalam sistem birokrasi itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pendekatan yang menekankan pada peningkatan kesadaran dan kapasitas institusi. Misalnya, penggunaan teknologi digital untuk menyederhanakan proses perizinan dan administrasi dapat menjadi salah satu inovasi yang diadopsi. Penggunaan platform digital seperti sistem *e-Government* yang terintegrasi dapat mengurangi inefisiensi birokrasi dan meningkatkan transparansi (Malodia *et al.*, 2021).

Selain itu, adopsi inovasi dalam reformasi birokrasi juga bergantung pada dukungan dari pemimpin dan keberadaan "champions" di dalam organisasi yang dapat mendorong perubahan. Kemitraan pemerintah-swasta (KPS) telah diidentifikasi sebagai mekanisme inovatif untuk mengatasi kendala birokrasi di sektor pariwisata Indonesia, namun efektivitasnya memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa KPS benar-benar dapat meningkatkan koordinasi dan investasi (Rhama & Setiawan, 2020).

Penelitian ini menemukan bahwa untuk mengatasi kendala birokrasi di sektor pariwisata Indonesia, adopsi praktik kebijakan yang sukses dari negara lain dan penerapan inovasi teknologi dalam birokrasi merupakan langkah yang efektif. Berdasarkan teori difusi kebijakan, disarankan agar pemerintah Indonesia mempelajari dan mengadaptasi kebijakan yang telah terbukti berhasil di negara lain, seperti sistem "*one-stop service*". Dari perspektif teori difusi inovasi, implementasi teknologi digital dan peningkatan kapasitas institusi menjadi kunci untuk menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya adopsi pendekatan inovatif yang didukung oleh kerangka kebijakan yang memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi. Selain itu, perlu adanya dukungan kuat dari kepemimpinan untuk memastikan bahwa inovasi dalam reformasi birokrasi dapat diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.

Dengan menggunakan teori difusi kebijakan dan teori difusi inovasi, penelitian ini berhasil mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi kendala birokrasi dalam sektor pariwisata Indonesia. Adopsi kebijakan yang sukses dari negara lain dan penerapan inovasi teknologi dalam birokrasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pariwisata Indonesia, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

4. 4. Strategi Reformasi Birokrasi dalam Industri Pariwisata Indonesia

Industri pariwisata Indonesia memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian nasional, meningkatkan devisa negara, serta memperkenalkan keanekaragaman budaya dan alam Indonesia ke dunia internasional. Namun, keberhasilan sektor ini sering kali terhambat oleh birokrasi yang rumit dan tidak efisien. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam diskusi ini, dua teori utama digunakan untuk menganalisis dan menyusun strategi reformasi birokrasi, yaitu teori tata kelola jaringan dan teori desain kebijakan.

Strategi pertama adalah membangun kolaborasi efektif antarpemangku kepentingan. Strategi ini merujuk pada teori tata kelola jaringan sebagaimana diuraikan oleh Kickert *et al.* (1997), dimana teori tersebut menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai aktor dalam sistem kebijakan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pariwisata, teori ini relevan untuk menganalisis bagaimana berbagai pemangku kepentingan – termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat – dapat bekerja sama untuk merampingkan birokrasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

Penelitian ini menemukan bahwa salah satu hambatan utama dalam merampingkan birokrasi di sektor pariwisata Indonesia adalah kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Sering kali, kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional tidak sepenuhnya diterapkan di tingkat daerah karena perbedaan prioritas dan kepentingan. Teori tata kelola jaringan menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah ini, diperlukan jaringan kolaboratif yang kuat yang dapat menyatukan berbagai aktor untuk bekerja menuju tujuan yang sama (Bryson & George, 2020).

Dalam konteks ini, penelitian ini merekomendasikan pembentukan forum tata kelola pariwisata yang melibatkan semua pemangku kepentingan utama. Forum ini dapat berfungsi sebagai platform untuk mendiskusikan tantangan dan mencari solusi bersama, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan selaras dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Selain itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan juga penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan partisipasi yang lebih luas dari semua pihak yang terlibat.

Strategi kedua, merancang kebijakan yang efektif dan fleksibel. Strategi ini menjadikan teori desain kebijakan sebagai landasan. Teori desain kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh Bemelmans-Videc *et al.* (2011), berfokus pada bagaimana kebijakan dapat dirancang secara efektif untuk mengatasi masalah sosial yang kompleks. Teori ini menekankan pentingnya pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti dalam perancangan kebijakan, serta kebutuhan akan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi.

Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan yang dirancang untuk merampingkan birokrasi di sektor pariwisata sering kali kurang efektif karena tidak mempertimbangkan kondisi lapangan yang dinamis. Sebagai contoh, regulasi yang terlalu kaku atau terlalu umum sering kali gagal menangkap realitas di lapangan, sehingga sulit diimplementasikan secara efektif. Berdasarkan teori desain kebijakan, disarankan bahwa kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari berbagai pemangku kepentingan, serta dilengkapi dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang memungkinkan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil di lapangan (Pacheco-Vega, 2020). Rekomendasi dari penelitian ini mencakup pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan, dengan fokus pada peningkatan kapasitas institusi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Selain itu, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap tahap perancangan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi hasil, untuk

memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan relevan dan dapat diterapkan secara efektif (Sarjito, 2023).

Kemudian, penelitian ini menemukan bahwa merampingkan birokrasi di sektor pariwisata Indonesia memerlukan pendekatan yang kolaboratif dan sistematis. Berdasarkan teori tata kelola jaringan, disarankan agar pemerintah Indonesia membangun jaringan kerja yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi dan mengatasi fragmentasi kebijakan. Dari perspektif teori desain kebijakan, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dan adaptif dalam perancangan kebijakan, yang memungkinkan kebijakan untuk disesuaikan dengan kondisi lapangan yang berubah-ubah.

Rekomendasi dari penelitian ini mencakup pembentukan forum tata kelola pariwisata yang melibatkan semua pemangku kepentingan utama, serta pengembangan kebijakan yang adaptif dan berbasis bukti. Dengan menerapkan pendekatan ini, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih efisien dan mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkelanjutan.

Dengan menggunakan teori tata kelola jaringan dan teori desain kebijakan, penelitian ini berhasil mengidentifikasi strategi yang dapat diimplementasikan untuk merampingkan birokrasi di sektor pariwisata indonesia. Kolaborasi antarpemangku kepentingan dan perancangan kebijakan yang adaptif adalah kunci untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memaksimalkan potensi sektor pariwisata sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

5. PENUTUP

Struktur dan prosedur birokrasi yang rumit dalam industri pariwisata Indonesia dibentuk oleh pengaruh teori kelembagaan dan teori implementasi kebijakan. Kedua teori ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana aturan formal, norma, dan mekanisme birokrasi mengatur operasional industri serta pelaksanaan kebijakan. Teori kelembagaan menjelaskan bagaimana norma-norma dan struktur birokrasi memengaruhi praktik dalam industri, sementara teori implementasi kebijakan menunjukkan proses penerjemahan kebijakan menjadi tindakan nyata. Memahami keterkaitan antara struktur birokrasi dan proses peraturan ini sangat penting bagi pembuat kebijakan, pemangku kepentingan industri, dan peneliti yang berupaya meningkatkan efektivitas serta keberlanjutan pembangunan pariwisata di Indonesia.

Inefisiensi birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia, seperti prosedur perizinan yang rumit dan inkonsistensi peraturan, menciptakan hambatan signifikan terhadap bisnis pariwisata dan kegiatan investasi. Melalui lensa ekonomi biaya transaksi, dapat dilihat bahwa birokrasi yang rumit ini meningkatkan biaya transaksi bagi bisnis dan investor, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan sektor ini. Selain itu, teori ketergantungan sumber daya menyoroti ketergantungan bisnis pariwisata pada persetujuan dan dukungan pemerintah, yang membuat mereka rentan terhadap inefisiensi birokrasi. Oleh karena itu, mengatasi inefisiensi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing, mengurangi biaya transaksi, dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan bisnis serta investasi di Indonesia.

Upaya perbaikan dan inisiatif kebijakan yang telah diterapkan di sektor pariwisata Indonesia menunjukkan penerapan prinsip-prinsip teori difusi kebijakan dan teori difusi inovasi. Dengan mengadopsi strategi-strategi yang berhasil dari konteks lain dan menerapkan pendekatan inovatif, Indonesia berupaya menyederhanakan proses administrasi dan mengatasi kendala birokrasi. Meskipun demikian, keberhasilan inisiatif-inisiatif ini membutuhkan evaluasi yang berkelanjutan serta adaptasi terhadap perubahan kondisi

industri untuk memastikan bahwa mereka tetap efektif dan relevan dalam mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi kendala birokrasi dalam industri pariwisata Indonesia, diperlukan pendekatan multifaset yang mengintegrasikan wawasan dari teori tata kelola jaringan dan teori desain kebijakan. Dengan meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan, merancang intervensi kebijakan yang tepat, dan memastikan pelaksanaan yang efektif, Indonesia dapat merampingkan birokrasi dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi pengembangan pariwisata. Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperkuat daya saing sektor pariwisata Indonesia di tingkat global tetapi juga akan membantu memaksimalkan potensi ekonomi dan budaya yang dimiliki oleh negara ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfirdaus, L., & Manalu, S. R. (2020). The politics of local government environmental evaluations: Assessing bureaucracy in post-Reformasi Indonesia. *Pacific Journalism Review*, 26(2), 72-87.
- Bemelmans-Videc, M.-L., Rist, R. C., & Vedung, E. O. (2011). *Carrots, sticks, and sermons: Policy instruments and their evaluation* (Vol. 1). Transaction Publishers.
- Berry, F. S., & Berry, W. D. (2018). Innovation and diffusion models in policy research. *Theories of the Policy Process*, 253-297.
- Bryson, J., & George, B. (2020). Strategic management in public administration. In *Oxford research encyclopedia: politics* (pp. 1-26). Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications.
- De Vita, G., & Kyaw, K. S. (2017). Tourism specialization, absorptive capacity, and economic growth. *Journal of Travel Research*, 56(4), 423-435.
- Dredge, D., & Jenkins, J. M. (2007). *Tourism planning and policy*. John Wiley & Sons.
- Fadli, M., Susilo, E., Puspitawati, D., Ridjal, A. M., Maharani, D. P., & Liemanto, A. (2022). Sustainable tourism as a development strategy in Indonesia. *Journal of Indonesian Tourism & Development Studies*, 10(1).
- Glyptis, L., Christofi, M., Vrontis, D., Del Giudice, M., Dimitriou, S., & Michael, P. (2020). E-Government implementation challenges in small countries: The project manager's perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 152, 119880.
- Hadiyanto, H. (2019). Bureaucratic barriers to sustainable tourism development in Indonesia. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(1), 12-24.
- Hartono, A. (2020). Pendekatan partisipatif dalam mengatasi tantangan prosedur administratif di industri pariwisata. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 15(3), 211-240.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance*. Sage.
- Huijgh, E. (2017). Indonesia's "Intermestic" public diplomacy: features and future. *Politics & Policy*, 45(5), 762-792.
- Iqbal, M., & Jogja, A. (2018). Bureaucratic constraints on tourism investment in Indonesia. . . *Journal of Economics and Sustainable Development*, 9(9), 1-10.
- Kickert, W. J. M., Koppenjan, J. F. M., & Klijn, E.-H. (1997). *Managing complex networks: Strategies for the public sector*.
- Lee, J., & Tan, S. (2018). Efisiensi birokrasi di sektor pariwisata Asia Tenggara: Studi komparatif. *Tourism Management Journal*, 37(2), 145-160.

- Lingard, R. (2016). Tourism and sustainable development: the impact on Indonesia's economy. *Journal of Sustainable Tourism*, 24(6), 789–805.
- Malodia, S., Dhir, A., Mishra, M., & Bhatti, Z. A. (2021). Future of e-Government: An integrated conceptual framework. *Technological Forecasting and Social Change*, 173, 121102.
- Munandar, A. *et al.* (2021). Strengthening community resilience through tourism development: Lessons from Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(1), 45–62.
- Nelson, P., Roberts, T., & Martin, L. (2021). Digital transformation in tourism: A pathway to overcoming bureaucratic challenges. *Journal of Digital Economy*, 5(2), 113–130.
- Nurrohim, H. *et al.* (2020). Community participation in tourism planning and development: A case study of Indonesia. *Tourism Management Perspectives*, 3(6), 1–10.
- Pacheco-Vega, R. (2020). Environmental regulation, governance, and policy instruments, 20 years after the stick, carrot, and sermon typology. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 22(5), 620–635.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. (2015). External control of organizations—Resource dependence perspective. In *Organizational behavior* 2 (pp. 355–370). Routledge.
- Pramusinto, A., & Quah, J. S. (2016). Weak central authority and fragmented bureaucracy: A study of policy implementation in Indonesia. *The Role of the Public Bureaucracy in Policy Implementation in Five ASEAN Countries*, 9, 98.
- Pratama, Y. (2019). Survei kuantitatif tentang hambatan administratif di industri pariwisata Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 22(1), 87–102.
- Purnaweni, H., & Pramono, H. (2019). Environmental regulation and sustainable tourism development in Indonesia. *Journal of Environmental Planning and Management*, 2100–2117.
- Reindrawati, D. Y. (2023). Challenges of community participation in tourism planning in developing countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2164240.
- Rhama, A., & Setiawan, I. (2020). Public-private partnerships in Indonesian tourism: A pathway to overcoming bureaucratic inefficiencies. *Journal of Southeast Asian Economic Development*, 12(1), 70–85.
- Rogers, E. M., Singhal, A., & Quinlan, M. M. (2014). Diffusion of innovations. In *An integrated approach to communication theory and research* (pp. 432–448). Routledge.
- Sarjito, A. (2023). The influence of social media on public administration. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(2), 106–117.
- Schoenefeld, J. J., Schulze, K., & Bruch, N. (2022). The diffusion of climate change adaptation policy. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change*, 13(3), e775.
- Scott, W. R. (2013). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities*. Sage publications.
- Setiawan, B., & Riyadi, M. (2016). Analisis peraturan pariwisata dan implikasi birokrasi di Indonesia: Studi kasus. *Journal of Public Policy and Tourism*, 14(4), 311–328.
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: perspektif potensi wisata daerah berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 23–35.
- Tang, Z. (2015). Coral reef conservation and tourism in Southeast Asia. *Marine Policy Journal*, 58, 78–85.
- Temenggung, D., Saputro, A., Rinaldi, R., & Pane, D. (2021). Managing recovery and seizing reform opportunities. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(1), 1–28.
- Turner, M., Prasojo, E., & Sumarwono, R. (2022). The challenge of reforming big bureaucracy in Indonesia. *Policy Studies*, 43(2), 333–351.
- Wahyuni, S., Taufik, A. A., & Hui, F. K. P. (2020). Exploring key variables of port competitiveness: evidence from Indonesian ports. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 30(5), 529–553.
- Widiastuti, T. (2020). Promoting sustainable tourism through regulatory reforms: Insights from Indonesia. *Sustainability*, 12(21), 1–15.

- Williamson, O. E. (1981). The economics of organization: The transaction cost approach. *American Journal of Sociology*, 87(3), 548–577.
- WTTC. (2019). *Travel & tourism economic impact 2019: Indonesia*.